

Membuka Akses Menyatukan Ekonomi: Peran Strategis Qris dalam Mewujudkan Ekonomi Digital Inklusif dan Merata di Indonesia

**Fitra Azrini¹, Ayu Aulia Wulandari², Nur Fadila³, Nurhafisa Salsabila⁴, Nirmawati⁵,
Puput Tri Handayani⁶, Nurrahma⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

Received : 3 Juli 2026, Revised : 8 Juli 2026, Published : 17 Juli 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Fitra Azrini

E-mail: azrinif8@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi signifikansi strategis dari Kode Respon Cepat Indonesia (QRIS) dalam mendorong ekonomi digital yang inklusif di Indonesia. Tinjauan pustaka, yang melibatkan pemeriksaan jurnal, laporan resmi, dan publikasi terkait, menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi untuk mempercepat transaksi digital dan inklusi keuangan, terutama untuk UMKM, dengan memanfaatkan sistem pembayaran yang efisien dan mudah diakses. Namun demikian, implementasinya terus menghadapi hambatan, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, literasi digital yang tidak memadai, dan adopsi teknologi yang tidak memadai. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa QRIS berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan integrasi keuangan, memberdayakan UMKM, dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran digital.

Kata kunci – QRIS, Ekonomi Digital, Inklusi Keuangan, UMKM, Sistem Pembayaran Digital

Abstract

The objective of this research is to evaluate the strategic significance of the Indonesian Quick Response Code (QRIS) in fostering an inclusive digital economy in Indonesia. The literature review, which involves the examination of journals, official reports, and associated publications, employs a qualitative approach in the research. The research findings indicate that QRIS has the potential to expedite digital transactions and financial inclusion, particularly for MSMEs, by utilising a payment system that is both efficient and readily accessible. Nevertheless, its implementation continues to encounter obstacles, including inadequate infrastructure, inadequate digital literacy, and inadequate technology adoption. In conclusion, this research demonstrates that QRIS serves as a strategic instrument to enhance financial integration, empower MSMEs, and promote sustainable economic development in Indonesia, in addition to serving as a digital payment tool.

Keywords – QRIS, Digital Economy, Financial Inclusion, MSMEs, Digital Payment System

How To Cite : Azrini, F., Wulandari, A. A., Fadila, N., Salsabila, N., Nirmawati, N., Handayani, P. T., & Nurrahma, N. (2026). Membuka Akses Menyatukan Ekonomi: Peran Strategis Qris dalam Mewujudkan Ekonomi Digital Inklusif dan Merata di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 3(2), 402 - 408. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v3i2.956>

Copyright ©2026 Fitra Azrini, Ayu Aulia Wulandari, Nur Fadila, Nurhafisa Salsabila, Nirmawati Nirmawati, Puput Tri Handayani, Nurrahma Nurrahma

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Evolusi teknologi digital telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, seperti cara individu mengakses layanan keuangan dan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Di Indonesia, transformasi digital telah muncul sebagai faktor krusial dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Selain memungkinkan transaksi, aksesibilitas layanan keuangan juga memperluas peluang komunitas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi formal (Pratama et al., 2025).

Namun, Indonesia terus menghadapi berbagai hambatan dalam upayanya mencapai inklusi keuangan. Distribusi yang adil dari akses ke layanan keuangan belum sepenuhnya tercapai di negara kepulauan dengan kondisi geografis dan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam. Komunitas perkotaan umumnya lebih mudah memanfaatkan layanan keuangan digital dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil karena perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital terus menjadi hambatan signifikan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata (Nasution, 2016).

Kesenjangan digital berfungsi sebagai ilustrasi dari perbedaan dalam pemanfaatan dan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Kondisi ini adalah hasil dari fakta bahwa kelompok-kelompok tertentu telah mendapatkan manfaat dari kenyamanan teknologi, sementara yang lain terus memiliki akses terbatas ke infrastruktur digital, menurut Tyas (Dimas et al., 2024). Pandangan tersebut sejalan dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menjelaskan bahwa kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga menyangkut kesempatan individu, rumah tangga, dunia usaha, maupun wilayah geografis dalam memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial (Fajar, 2021).

Sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada tahun 2019 sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. Kehadiran QRIS bertujuan menyederhanakan sistem pembayaran digital sehingga berbagai aplikasi pembayaran dapat digunakan melalui satu standar yang sama. Sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi transaksi bagi masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap layanan keuangan digital (K.FLintang et al., 2025)

Selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi, QRIS juga memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemanfaatan QRIS memungkinkan pelaku usaha menerima pembayaran secara digital tanpa harus menyediakan berbagai jenis aplikasi pembayaran yang berbeda. Dengan demikian, QRIS berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperluas jangkauan pasar UMKM (Puspasari & Permana, 2024). Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum meratanya kesiapan infrastruktur di berbagai daerah (Bachtiar et al., 2020).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi QRIS dari berbagai perspektif. Pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan literasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat adopsi QRIS (Rizqiah & Suwito, 2024). Selain itu, QRIS berperan dalam memperkuat sistem pembayaran domestik sekaligus mendukung kedaulatan digital Indonesia (Yani, 2025). QRIS juga memberikan kemudahan bagi konsumen melalui proses transaksi yang lebih cepat dan efisien, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala teknis serta keterbatasan literasi pengguna (Wisudaningsih & Aqidah, 2024).

Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya telah berfokus pada penerapan QRIS dalam konteks-konteks tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada UMKM, perdagangan internasional, dan perilaku konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan menetapkan QRIS sebagai salah satu instrumen strategis yang mendukung distribusi yang adil dari ekonomi digital dengan meningkatkan inklusi keuangan, memberdayakan

UMKM, dan memperluas akses ke layanan keuangan bagi komunitas yang belum dilayani secara optimal.

Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian tentang peran strategis QRIS masih relevan untuk pengembangan lebih lanjut. Sejalan dengan transformasi digital yang cepat di Indonesia, sangat penting untuk melakukan penelitian yang dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang peran QRIS dalam mengurangi kesenjangan digital antar wilayah dan mempromosikan inklusi keuangan. Diharapkan bahwa temuan dari studi ini akan dipertimbangkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong distribusi yang adil terhadap akses layanan keuangan digital. Ini akan memastikan bahwa implementasi QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis QRIS dalam mendukung terwujudnya ekonomi digital yang inklusif dan merata di Indonesia. Analisis difokuskan pada kontribusi QRIS dalam memperluas akses layanan keuangan digital, mendorong digitalisasi UMKM, mendukung pemerataan ekonomi antardaerah, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan Standar nasional untuk pembayaran berbasis kode QR dikembangkan oleh Bank Indonesia dan mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2019. Tujuan dari QRIS adalah untuk mengkonsolidasikan berbagai layanan pembayaran digital ke dalam satu standar, sehingga memfasilitasi transaksi dengan cara yang lebih aman, efisien, dan cepat. Pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan berbagai aplikasi uang elektronik atau perbankan seluler yang terintegrasi dengan memindai satu kode QR melalui sistem ini. Standarisasi sistem pembayaran tidak hanya meningkatkan efisiensinya tetapi juga memfasilitasi proliferasi transaksi elektronik di Indonesia (K.FLintang et al., 2025).

QRIS telah muncul sebagai alat penting dalam kemajuan transformasi digital, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), selain memfasilitasi transaksi. QRIS memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, sambil tetap mempertahankan antarmuka yang ramah pengguna dan biaya implementasi yang relatif rendah (Puspasari & Permana, 2024).

Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan

Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai metode utama dalam proses produksi, distribusi, konsumsi, dan transaksi. Evolusi teknologi informasi telah menghasilkan transformasi pola transaksi masyarakat dari sistem tradisional ke sistem pembayaran digital yang lebih efisien. Selain itu, modifikasi-modifikasi ini menawarkan akses yang lebih nyaman bagi masyarakat ke berbagai layanan keuangan (Pratama et al., 2025).

Kinerja ekonomi digital adalah salah satu indikator dari perluasan inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah keadaan di mana semua anggota masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan formal, tanpa memandang status geografis, ekonomi, atau sosial mereka. Namun demikian, kesenjangan digital terus berdampak pada tingkat inklusi keuangan di Indonesia, terutama terkait dengan rendahnya literasi digital, akses internet yang terbatas, dan infrastruktur teknologi di banyak daerah. Akibatnya, diharapkan bahwa peningkatan sistem pembayaran digital, seperti QRIS, akan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah dan meningkatkan akses ke layanan keuangan (Bachtiar et al., 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji peran strategis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam mendukung ekonomi digital yang inklusif di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta publikasi ilmiah dan artikel daring yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi yang berkaitan dengan QRIS, inklusi keuangan, dan ekonomi digital. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi QRIS dalam memperluas inklusi keuangan serta mendukung pemerataan ekonomi digital di Indonesia.

PEMBAHASAN

Peran QRIS dalam Mendukung Ekonomi Digital

Hasil kajian menunjukkan bahwa QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan salah satu inovasi sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia. QRIS mulai diperkenalkan pada tahun 2019 dan diimplementasikan secara nasional pada awal tahun 2020 sebagai standar pembayaran berbasis kode QR yang dapat digunakan oleh seluruh penyedia jasa pembayaran digital (Indonesia, 2020). Kehadiran QRIS mampu menyederhanakan proses transaksi karena pengguna hanya memerlukan satu kode QR yang dapat dipindai melalui berbagai aplikasi pembayaran digital. Sistem ini menjadikan transaksi lebih cepat, mudah, aman, dan efisien sehingga mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai menuju transaksi digital.

Berdasarkan hasil telaah berbagai literatur, penerapan QRIS memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penggunaan QRIS memungkinkan pelaku usaha menerima pembayaran digital tanpa harus menyediakan berbagai aplikasi pembayaran yang berbeda. Kondisi tersebut meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung pengembangan ekonomi digital nasional (Leksono, 2023).

Tantangan Implementasi QRIS

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa implementasi QRIS masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur digital, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Keterbatasan jaringan internet, kualitas sinyal yang belum stabil, serta akses listrik yang belum merata menyebabkan pemanfaatan QRIS belum dapat dilakukan secara optimal (Keuangan, 2024).

Selain kendala infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat adopsi QRIS. Sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pembayaran digital serta memiliki kekhawatiran terhadap keamanan transaksi elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha masih memilih menggunakan sistem pembayaran tunai dibandingkan pembayaran digital.

Tantangan lainnya berkaitan dengan aspek ekonomi, yaitu biaya awal yang diperlukan untuk mendukung digitalisasi usaha. Walaupun penggunaan QRIS relatif murah, beberapa pelaku UMKM masih menganggap biaya perangkat pendukung, akses internet, maupun pelatihan sebagai beban tambahan. Akibatnya, proses adopsi QRIS berjalan lebih lambat, terutama pada usaha berskala mikro dengan keterbatasan modal (Listiyono et al., 2024).

Strategi Penguatan Implementasi QRIS

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan QRIS di seluruh Indonesia. Strategi yang dilakukan meliputi penyelenggaraan program edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat transaksi digital, peningkatan literasi keuangan digital, serta sosialisasi penggunaan QRIS kepada pelaku UMKM dan masyarakat umum (Sari, 2024).

Selain edukasi, pemerintah juga terus mengembangkan infrastruktur digital melalui perluasan jaringan internet dan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi. Dukungan tersebut diperkuat melalui pemberian pelatihan, pendampingan, serta bantuan perangkat kepada pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan QRIS secara optimal dalam kegiatan usahanya (Wiranta et al., 2024).

Berbagai strategi tersebut menunjukkan hasil yang positif. Data hingga akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah pengguna QRIS terus mengalami peningkatan. Lebih dari 15 juta merchant telah menggunakan QRIS dan sekitar 60% di antaranya merupakan pelaku UMKM. Selain itu, transaksi pembayaran digital juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin menerima penggunaan sistem pembayaran digital sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.

Analisis Peran Strategis QRIS

Berdasarkan hasil analisis, QRIS memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi digital yang inklusif di Indonesia. Keberadaan QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi pelaku UMKM dan kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan. Dengan semakin luasnya penggunaan QRIS, proses transaksi menjadi lebih praktis, transparan, dan terdokumentasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas pelaku usaha.

Namun demikian, keberhasilan implementasi QRIS masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi digital, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan sektor swasta perlu terus diperkuat. Melalui langkah tersebut, QRIS diharapkan tidak hanya menjadi alat pembayaran digital, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mempercepat inklusi keuangan, memperkuat daya saing UMKM, serta mewujudkan pembangunan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya ekonomi digital yang inklusif dan merata di Indonesia. Melalui sistem pembayaran yang terintegrasi, QRIS mampu memperluas akses layanan keuangan digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kelompok *non-bankable*, sehingga mendorong peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi. Selain itu, penerapan QRIS turut mendukung pemerataan ekonomi digital dengan membuka peluang bagi pelaku usaha di berbagai daerah untuk terhubung dengan ekosistem pembayaran digital nasional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi QRIS dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah, seperti penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi keuangan, serta dukungan terhadap digitalisasi UMKM. Meskipun demikian, implementasi QRIS masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum meratanya infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan kemampuan sebagian pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan, sektor swasta, dan

masyarakat agar pemanfaatan QRIS dapat semakin optimal dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembayaran digital, tetapi juga dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dalam memperluas inklusi keuangan, meningkatkan daya saing UMKM, dan mengurangi kesenjangan ekonomi digital antarwilayah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung percepatan transformasi ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode studi literatur yang hanya memanfaatkan data sekunder sehingga belum mampu menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif lapangan, atau *mixed methods* dengan melibatkan pelaku UMKM, pengguna QRIS, maupun penyedia layanan pembayaran digital sebagai responden. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh implementasi QRIS terhadap peningkatan inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, P. P., Diningrat, R. A., Kusuma, A. Z. D., Izzati, R. Al, & Diandra, A. (2020). Ekonomi Digital untuk Siapa? Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia. *Jakarta: Smeru Research Institute*. Diakses dari: <https://smeru.or.id/id/content/ekonomi-digital-untuk-siapa>
- Dimas, M., Fahlevvi, M. R., & Sumbawa, P. K. (2024). Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(2), 82.
- Fajar, I. (2021). Kesenjangan Digital Tingkat Ketiga pada Pemuda Pedesaan di Kabupaten Cianjur , Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Informatika*, 10(1), 44–54.
- Indonesia, B. (2020). Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. Bank Indonesia. Diakses dari: <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>
- Institute, M. G. (2016). *How digital finance could boost growth in emerging economies*. Diakses dari: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies>
- K.FLintang, S., Walewangko, E. N., & F.Rorong, I. P. (2025). Dampak Penggunaan QRIS Pada Pelaku UMKM Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2(1), 16.
- Leksono, N. (2023). Optimalisasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan. *Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 363.
- Listiyono, H., Wahyudi, E. N., & Diartono, D. A. (2024). Dinamika Implementasi QRIS : Meninjau Peluang dan Tantangan bagi UMKM Indonesia. *IKRAITH-INFORMATIKA*, 8(2), 120–126.
- Nasution, R. D. (2016). Pengentasan Digital Dividedalam Penerapan E-Governmentdi Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 20(1), 35.
- Pratama, M. F., Efendi, B., & Nasution, L. N. (2025). Transformasi Digital Ekonomi dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 66.
- Puspasari, D., & Permana, A. F. (2024). Implementasi Qris Dalam Mendukung Digitalisasi Umkm di Desa Cilingga Kecamatan Darangdan Purwakarta. *EJOIN*, 2(10), 1425.
- Rizqiah, K., & Suwito, S. (2024). Strategi Peningkatan Ekonomi Digital Dalam Menerapkan Pembayaran Qris di bidang Ekonomi Pada Masa Mendatang. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(5).
- Sari, I. P. (2024). Adoption of Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) through a Strategy to Increase the Financial Literacy of UMKM Players in the City of Solo Adopsi Qris (Quick

- Response Code Indonesian Standard) Melalui Strategi Peningkatan Literasi Keuangan P. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, 2(6), 931–942.
- Wiranta, A., Surjaatmadja, U., Widjayanto, J., & Sulistyad, E. (2024). Digitalisasi Mata Uang Rupiah Sebagai Kedaulatan Moneter Dalam Rangka Mendukung Keamanan Nasional. CV. Jawa Barat: CV. Aksara Global Akademia.
- Wisudaningsih, E. T., & Aqidah, W. (2024). Analisis Pemanfaatan Qris dalam Kemudahan Pembayaran Konsumen Car Free Day Kraksaan. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6(2), 330-337.
- Yani, P. (2025). Dampak QRIS terhadap Kedaulatan Digital Indonesia dan Hubungan Perdagangan Internasional. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(2), 36-42.